



► PENERIMAAN SISWA BARU

Daerah Tunggu Skema Pembiayaan PPDB

Triyo Handoko, Lugas Subarkah, & Catur Dwi Janati
redaksi@harianjogja.com

JOGJA—Dinas Pendidikan dan Olahraga di DIY masih menunggu petunjuk teknis sistem baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), termasuk soal pembiayaan bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.

Pemerintah Pusat akan mengganti sistem PPDB pada tahun ajaran 2025/2026. Salah satu yang kebijakan baru yakni siswa yang tidak diterima di sekolah negeri akan diarahkan ke swasta dengan dibantu pembiayaannya oleh pemerintah daerah.

► Halaman 10

Daerah Tunggu...

Kepala Disdikpora Kulonprogo, Nur Wahyudi, masih menunggu kepastian kebijakan penanggulangan biaya pendidikan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri dan masuk swasta. "Selama ini sekolah swasta juga mendapat dana BOS, kami juga masih menunggu soal teknis kebijakan tersebut," ujarnya, Jumat (24/1).

Ia menjelaskan sistem PPDB sebelumnya yang berbasis zonasi dan KK memang terdapat upaya kecurangan dalam pantauannya pada 2024 lalu. "Tapi bisa kami tangani dengan baik, kami kemarin meningkatkan pengecekan, ada yang ketahuan lalu kami batalkan penerimaannya tersebut," katanya.

Sementara dengan kebijakan baru ini, jelas Wahyudi, pihaknya belum tahu pasti indikator yang digunakan dalam penentuan domisili. "Apakah dengan surat keterangan? Atau apa belum tahu juga karena juknisnya juga belum ada," ungkapnya.

Penggunaan surat keterangan untuk menunjukan domisili, menurut Wahyudi, juga rentan menimbulkan kecurangan. "Tapi kami juga belum tahu masih menunggu juga detail aturannya," ujarnya.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdik Sleman, Dwi Warni Yuliastuti, menyampaikan hingga kini belum ada pemberitahuan resmi atau sosialisasi wacana metode baru PPDB. Di daerah, Dwi juga menunggu petunjuk resmi pelaksanaan wacana tersebut. Selain menunggu petunjuk pelaksanaan PPDB domisili, Dwi juga belum mengetahui detail

wacana pemerintah daerah yang diminta membantu siswa yang tidak diterima di sekolah negeri untuk masuk di sekolah swasta. "Belum tahu, artinya sebelum ada informasi resmi dari kementerian atau produk hukum atau ketentuan yang mengatur kami juga belum tahu [penerapannya]," ujarnya.

Program Selaras

Walau belum resmi diluncurkan, sistem baru PPDB dinilai selaras dengan kebijakan di Kota Jogja. Kabid Pendidik Tenaga Kependidikan Data dan Sistem Informasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Jogja, Mannarima, menjelaskan terkait dengan sistem PPDB baru, saat ini belum ada informasi resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. "Belum ada informasi. Tanggal 29 sampai 31 Januari saya baru akan mengikuti uji publik Peraturan Menteri terkait Sistem Penerimaan Murid Baru," ujarnya saat dihubungi, Jumat (24/1).

Meski demikian, dari informasi yang beredar, ia melihat sistem PPDB yang baru justru akan selaras dengan kebijakan di Kota Jogja. "Saya kira akan selaras, karena Kota Jogja termasuk yang dimintai masukan beberapa waktu lalu," ujarnya.

Ia mencontohkan seperti pada rencana pelibatan sekolah swasta untuk menerima calon siswa yang tidak lolos di sekolah negeri, kemudian dibantu pembiayaannya oleh pemerintah. Kota Jogja sudah menerapkan kebijakan ini untuk murid difabel. "Itu

kan seperti kebijakan kita yang untuk penyandang disabilitas. Bila tidak diterima di sekolah negeri, akan diarahkan di swasta dan mendapatkan JPD [Jaminan Pendidikan Daerah]. Jadi Jogja sudah menerapkan itu untuk disabilitas," katanya.

Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berencana mengganti sistem PPDB. Beberapa poin baru di antaranya tidak adanya zonasi dan mengarahkan calon siswa yang tidak lolos di sekolah negeri ke sekolah swasta dengan dibiayai pemerintah daerah.

Bisa Lebih Baik

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Gunungkidul, Nunuk Setyowati, berharap PPDB dengan model domisili bisa lebih baik, ketimbang yang diberlakukan pada periode-periode sebelumnya. Nunuk juga meminta untuk kuota yang diberikan bisa lebih diperkecil persentasenya. "Intinya kami ikuti arahan dari Pusat karena dengan model domisili sebagai bentuk penghargaan untuk warga yang berada di lingkungan sekolah. Siapa lagi yang mau jaga keamanan, kalau bukan warga di lingkungan sekitar sekolah," katanya.

Kepala Disdikpora Kabupaten Bantul Nugroho Eko Setyanto, mengaku sudah mendapatkan penjelasan dari Disdikpora DIY terkait dengan rencana perubahan tersebut. Akan tetapi, Nugroho menilai informasi yang ada masih belum final dan belum detail.

(Jumali & David Kurniawan)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005